

**TRANSPARANSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD) MELALUI *E-GOVERNMENT* DI
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Diajukan Oleh :

**HASRI WAHYUTI
07011381520155**

Konsentrasi Keuangan Negara dan Fiskal

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**TRANSPARANSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD) MELALUI *E-GOVERNMENT* DI
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**

Oleh :

HASRI WAHYUTI

07011381520155

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 25 September 2019

Pembimbing I

Dr. Lili Erina, M.Si
NIP. 196612301992032001



Pembimbing II

Sofyan Effendi, S.IP, M.SI
NIP. 197705122003121003



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “*Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui E-Government di Kabupaten Ogan Komering Ilir*” telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Pada Tanggal 10 Oktober 2019.

Indralaya, 10 Oktober 2019

Ketua

Dr. Lili Erina, M.Si
NIP. 196612301992032001



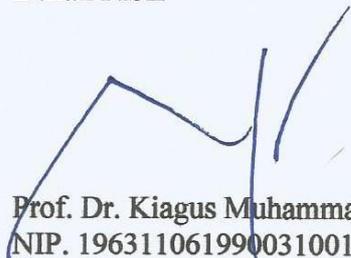
Anggota

1. Sofyan Effendi, S.IP, M.Si
NIP. 197705122003121003

2. Dra. Martina, M.Si
NIP. 196603052993022001

3. Drs. Gatot Budiarto, MS
NIP. 195806091984031002

Mengetahui,
Dekan FISIP



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA
NIP. 19810827200912100

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Karenan sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Qs. 94 : 5-6)

Skripsi ini Ku persembahkan kepada:

1. Almamaterku
2. Dosen dan Pegawai FISIP
Universitas Sriwijaya
3. Kedua Orang Tua Ku,
Ayahanda Abdul Hamid Baki,
dan Ibunda Herlina
4. Saudari-saudari Ku, Hayu,
Hasti dan Hamelia

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat, karunia dan Ridho-Nya yang telah diberikan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “**Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Melalui E-Government di Kabupaten Ogan Komering Ilir**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S-1 dalam bidang Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Skripsi ini dapat tersusun dengan baik atas bantuan banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai tanda penghormatan yang sedalam-dalamnya, penulis dengan tulus menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Abdul Hamid dan Herlina yang selalu mendo'akanku, mendidikku, mendukung moril dan materil, dan memberiku semangat dalam suka maupun duka serta kasih sayang tak terhingga yang Papa dan Mama berikan kepadaku.
2. Saudara dan Saudariku, Hayu Wasna Sari, Zeckri Hermansyah, Hasti Triana Putri, Akip Sapta Wijaya, dan Hamelia Pratiwi yang telah memberikan do'a dan semangat untuk keberhasilan dalam penulisan skripsi ini.
3. Seluruh keluarga besarku yang telah memberikan motivasi dan do'a kepadaku.
4. Bapak Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan FISIP UNSRI.
5. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara .
6. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selalu memberi dukungan.
7. Ibu Dr. Lili Erina, M.SI selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Sofyan Effendi. S.IP, M.SI selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan, saran dan semangat selama penulisan dan penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Sofyan Effendi. S.IP, M.SI. selaku Dosen Pembimbing Akademik
9. Seluruh pegawai dan staff administrasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan banyak bantuan.

10. Bapak dan Ibu Dosen FISIP UNSRI yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan bantuan selama masa perkuliahan dan seluruh karyawan FISIP UNSRI yang telah mendukung penulisan skripsi ini.
11. Seluruh pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
12. Seluruh Pegawai di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir.
13. Seluruh Pengurus Ikatan Wartawan Online Kab. Ogan Komering Ilir
14. Sahabat-sahabatku yang selalu menjadi teman berbagi dan penyemangat setiap saat.
15. Teman-teman seperjuanganku Ilmu Administrasi Negara 2015 yang selalu menemani hari-hariku dalam menjalani kehidupan sebagai Mahasiswa.
16. Almamater kuning kebanggaanku.

Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan Skripsi ini. Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak yang berkepentingan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan Skripsi ini. Semoga seluruh bantuan dan partisipasi mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Inderalaya, September 2019

HASRI WAHYUTI

ABSTRACT

This thesis aims to find out Regional Government Budget transparency through e-government in Ogan Komering Ilir Regency. The Government of Ogan Komering Ilir Regency only provides a website, but does not publish Regional Government Budget periodically. The Concept used is the Transparency Aspects from Krina (2003:15) which include the Provision of Information, Easy access to information, Provision of Complaints Mechanisms, and Collaboration with the mass media. The research used a qualitative method. Data collection techniques consist of interviews, observation, and documentation. The results of the research found that summary of the 2017 Revised Regional Government Budget document has been published on the official website of Ogan Komering Ilir Regency. In the aspect of Ease of Access to Information, the official website has been equipped with quality hosting, a security system, search column, easy to remember domain names, and a link to download summary of the 2017 Revised Regional Government Budget document. In the other aspect, the official website of Ogan Komering Ilir Regency has provided LAPOR!-SP4N as a report facility and the human resources that manage it. The Government of Ogan Komering Ilir Regency has also collaborated with several mass media for the publication of regional development news. On the official website of the Ogan Komering Ilir Regency, Regional Government Budget documents should be published periodically with a link to download them. On the management of complaints, every complaint that comes in should be responded quickly. The Government of Ogan Komering Ilir Regency must also publish APBD in the mass media.

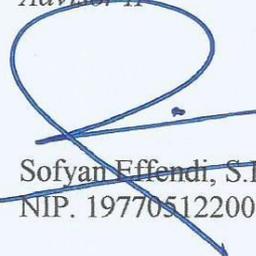
Keywords : Transparency, Regional Government Budget, E-government, Website, and Publication

Advisor I



Dr. Lili Erina, M.Si
NIP. 196612301992032001

Advisor II



Sofyan Effendi, S.IP, M.Si
NIP. 197705122003121003

Indralaya, 15 Oktober 2019
Head of Public Administration Department
Faculty of Social and Political Sciences
Sriwijaya University



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui *E-government* di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir hanya menyediakan *website* resmi, tetapi belum mempublikasi dokumen APBD secara berkala. Konsep yang digunakan ialah Aspek - Aspek Transparansi dari Krina (2003:15) yang meliputi Penyediaan Informasi, Kemudahan akses informasi, Penyediaan Mekanisme Pengaduan, serta Kerjasama dengan media massa. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa dokumen Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 telah dipublikasi pada *website* resmi Pemkab Ogan Komering Ilir. Pada aspek Kemudahan Akses Informasi, *website* resmi tersebut telah dilengkapi dengan *hosting* yang berkualitas, sistem keamanan, kolom pencarian, nama domain yang mudah diingat, serta *link* untuk mengunduh Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017. Pada *website* resmi Pemkab Ogan komering Ilir telah tersedia sarana pengaduan LAPOR!-SP4N dan SDM yang mengelolanya. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir juga telah bekerja sama dengan beberapa media massa untuk publikasi berita pembangunan daerah. Pada *website* resmi Pemkab Ogan Komering Ilir seharusnya dokumen APBD dipublikasi secara berkala beserta *link* untuk mengunduhnya. Pada pengelolaan pengaduan, setiap pengaduan yang masuk seharusnya diberikan tanggapan dengan rentang waktu yang singkat. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir juga harus mempublikasi APBD di media massa.

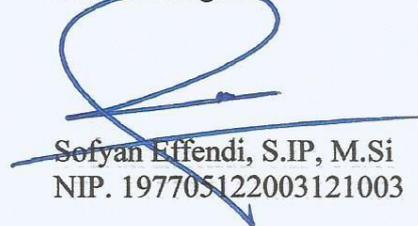
Kata Kunci : Transparansi, APBD, E-government, Website, dan Publikasi

Pembimbing I



Dr. Lili Erina, M.Si
NIP. 196612301992032001

Pembimbing II



Sofyan Effendi, S.IP, M.Si
NIP. 197705122003121003

Indralaya, 15 Oktober 2019
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	IV
KATA PENGANTAR	IV
ABSTRACT	VII
ABSTRAK.....	VIII
DAFTAR ISI.....	IX
DAFTAR TABEL.....	XI
DAFTAR LAMPIRAN	XIII
DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN, DAN LAMBANG.....	XIV

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori	9
B. Penelitian Terdahulu.....	22
C. Kerangka Pemikiran	25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	26
B. Definisi Konsep	27
C. Fokus Penelitian	28
D. Informan Penelitian	30
E. Data dan Sumber Data	31
F. Teknik Pengumpulan Data	32
G. Teknik Analisis Data	33

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum <i>Website</i> Resmi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Sebagai Wujud <i>E-Government</i>	34
a. Sejarah <i>Website</i> Pemerintah Ogan Komering Ilir	34
b. Visi dan Misi <i>Website</i> Pemerintah Ogan Komering Ilir	36
c. Bentuk Penerapan Tipe Komunikasi <i>E-Government</i> pada <i>website</i> Resmi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir	37
d. Organisasi Pengelola <i>Website</i> Resmi Pemerintah Ogan Komering Ilir	48
e. Pengelolaan dan Pengembangan <i>Website</i> Resmi Kabupaten Ogan Komering Ilir	51

B. Analisis dan Pembahasan Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui <i>E-government</i> di Kab. Ogan Komering Ilir.....	55
a. Analisis Penyediaan Dokumen APBD melalui <i>website</i> Kab. Ogan Komering Ilir	56
b. Analisis Kemudahan Akses Informasi APBD melalui <i>website</i> Kabupaten Ogan Komering Ilir.	72
c. Analisis Penyediaan Suatu Mekanisme Pengaduan didalam <i>Website</i> Resmi Pemkab Ogan Komering Ilir.....	83
d. Analisis Kerjasama dengan Media Massa dalam Mempublikasi Informasi APBD	99

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	104
B. Saran	105

DAFTAR PUSTAKA	107
-----------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penelitian Terdahulu	23
2. Fokus Penelitian	29
3. Konten <i>website</i> Kabupaten Ogan Komering Ilir yang Paling Sering Diakses	46
4. Anggaran Pengelolaan dan Pengembangan <i>Website</i>	54
5. Laporan Pengaduan ke Aplikasi LAPOR!-SP4N Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018.....	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Tampilan menu di <i>website</i> resmi Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	5
2. Tampilan menu Beranda di <i>website</i> resmi Kab. Ogan Komering Ilir.....	5
3. Tampilan menu <i>link</i> Terkait di <i>website</i> resmi Kab. Ogan Komering Ilir.....	6
4. Kerangka Pemikiran.....	25
5. Menu Profil pada <i>website</i> resmi Pemkab Ogan Komering Ilir.....	38
6. Menu Pemerintah pada <i>website</i> resmi Pemkab Ogan Komering Ilir.....	39
7. <i>Link website</i> resmi Republik Indonesia pada <i>website</i> resmi Pemkab Ogan Komering Ilir.....	40
8. <i>Link website</i> resmi KEMENDAGRI dan KPK pada <i>website</i> resmi Pemkab Ogan Komering Ilir.....	40
9. Sub Menu Berita pada <i>website</i> resmi Pemkab Ogan Komering Ilir.....	41
10. Sub Menu Vide, Kesehatan, dan Pendidikan pada <i>website</i> resmi Pemkab Ogan Komering Ilir.....	42
10. Menu Pelayanan Publik pada <i>website</i> resmi Pemkab Ogan Komering Ilir.....	43
12. <i>Link website</i> LAPOR! pada <i>website</i> resmi Pemkab Ogan Komering Ilir.....	44
13. Kolom untuk menuliskan pengaduan di <i>website</i> LAPOR!.....	44
14. <i>Link website</i> JDIH pada <i>website</i> resmi Pemkab Ogan Komering Ilir.....	45
15. <i>Website resmi JDIH Kab. Ogan Komering Ilir tidak dapat diakses</i>	45
16. <i>Link website</i> LPSE pada <i>website</i> resmi Pemkab Ogan Komering Ilir.....	48
17. <i>Website</i> LPSE Kab. Ogan Komering Ilir tidak dapat diakses.....	48
18. Hasil pencarian dari kata APBD di <i>website</i> resmi Pemkab OKI.....	57
19. Tampilan Halaman dari <i>link</i> “Data APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2017”.....	58
20. Dokumen Elektronik Ringkasan Perubahan Tahun Anggaran 2017 Kab. Ogan Komering Ilir yang dipublikasi pada <i>website</i>	59
21. Hasil pencarian dari kata “APBD Perubahan” di <i>website</i> resmi Pemkab OKI.....	60
22. Hasil pencarian dari kata “Laporan Realisasi” di <i>website</i> resmi Pemkab OKI.....	66
23. Tanggal Publikasi dokumen APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017.....	71
24. <i>Website</i> Resmi Pemkab OKI telah menggunakan sistem keamanan SSL.....	76
25. Nama domain <i>website</i> resmi Pemkab Ogan Komering Ilir.....	77
26. Kolom penacarian dalam <i>website</i> resmi pemkab Ogan Komering Ilir.....	79
27. <i>link</i> “APBD Tahun Anggaran 2017” pada <i>website</i>	80
28. Dokumen Elektronik Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 Kab. Ogan Komering Ilir yang dipublikasi pada <i>website</i>	81
29. <i>Link</i> fitur LAPOR! pada <i>website</i> resmi Pemkab Ogan Komering Ilir.....	85
30. Kolom untuk menuliskan pengaduan di <i>website</i> LAPOR!.....	85
31. Menu “Tentang LAPOR!” pada <i>website</i> resmi LAPOR!-SP4N.....	89

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas
2. Surat Keputusan Penunjukan Dosen Pembimbing
3. Surat Izin Penelitian Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Ogan Komering Ilir
4. Surat Persetujuan Izin Penelitian Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Ogan Komering Ilir
5. Surat Izin Penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Ogan Komering Ilir
6. Surat Persetujuan Izin Penelitian Badan Pengelolaan dan Aset Daerah
7. Surat Izin Penelitian Ikatan Wartawan Online Kab. Ogan Komering Ilir
8. Surat Persetujuan Izin Penelitian Ikatan Wartawan Online Kab. Ogan Komering Ilir
9. Kartu Bimbingan Usulan Skripsi
10. Lembar Revisi Seminar Proposal
11. Kartu Bimbingan Skripsi
12. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 168/KEP/DISKOMINFO/TAHUN 2017
13. Lampiran Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 168/KEP/DISKOMINFO/TAHUN 2017
14. Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan (SPKK)

DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN, DAN LAMBANG

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
API	: <i>Application Programming Interface</i>
ASN	: Aparatur Sipil Negara
BPKAD	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat
<i>e-government</i>	: <i>Electronic Government</i>
G2B	: <i>Government to Bussiness</i>
G2C	: <i>Government to Citizens</i>
G2G	: <i>Government to Government</i>
Inpres	: Instruksi Presiden
JDIH	: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
KOMINFO	: Komunikasi, dan Informatika
LAPOR!	: Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat
LPSE	: Layanan Pengadaan Secara Elektronik
OPD	: Organisasi Pemerintah Daerah
PAN-RB	: Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
PERMENDAGRI	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SIMDA	: Sistem Informasi Manajemen Daerah
SIRUP	: Sistem Rencana Umum Pengadaan
SK	: Surat Keputusan
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SPKK	: Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan
SP4N	: Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
SSL	: <i>Secure Sockets Layer</i>
TA	: Tahun Anggaran
TAPD	: Tim Anggaran Pemerintah Daerah
UU	: Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menginjak era reformasi, perkembangan demokratisasi politik dan desentralisasi sistem pemerintahan telah membawa gebrakan baru dalam aktivitas birokrasi di Indonesia. Tidak hanya terfokus pada kebijakan politis yang kental akan peran administrator pusat, kebijakan tentang keuangan juga menjadi kajian administrasi publik yang mulai mendapat perhatian, baik dari lembaga formal pemerintah, masyarakat maupun peran pihak *non governmental institutions/organizations*. Oleh karena itu akses warga atas informasi keuangan mendukung transparansi pemerintah dalam mengumumkan informasi publik.

Transparansi keuangan telah menjadi kebutuhan warga dan telah mendapat perhatian Pemerintah Indonesia. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003), Indonesia secara formal telah berkomitmen untuk mengelola keuangan yang mengadopsi pilar-pilar utama tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan kepatuhan.

Anggaran daerah atau yang lebih dikenal dengan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah pernyataan tentang rencana pendapatan dan belanja daerah dalam periode tertentu (1 tahun). Pada awalnya fungsi APBD adalah sebagai pedoman pemerintah dalam mengelola keuangan untuk satu periode. Sebelum anggaran dijalankan harus mendapat persetujuan dari DPRD sebagai wakil rakyat, maka disini fungsi anggaran adalah sebagai alat pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap kebijakan publik. Berdasarkan fungsi anggaran tersebut maka seharusnya anggaran merupakan *power relation* antara eksekutif, legislatif dan rakyat itu sendiri.

Pengelolaan APBD terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan tersebut terdiri dari Perencanaan atau Penganggaran, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pengendalian atau

Pengawasan. Salah satu asas umum dalam pengelolaan keuangan daerah ialah asas Transparan sesuai PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pentingnya transparansi pengelolaan keuangan ialah untuk meningkatkan kepercayaan (*trust*). Pemerintah yang terbuka menyampaikan informasi keuangan kepada publik lebih dipercaya dibanding pemerintah yang relatif tertutup. Pemerintah yang tertutup dengan informasi keuangan dapat dinilai warga memiliki setumpuk rahasia penyelewengan keuangan. Transparansi dapat pula meningkatkan pengawasan masyarakat (*controlling*). Untuk mengefektifkan pelaksanaan pembangunan warga perlu disertakan dalam pengawasan. Pengawasan ini akan efektif bila warga mendapat informasi tentang pembiayaan program/kegiatan. Warga atau masyarakat dapat menilai dan memberikan masukan untuk berbagai kekurangan atau kelalaian pelaksanaan program/kegiatan jika pemerintah transparan dalam penyampaian informasi keuangan program/kegiatan. Terwujudnya transparansi dapat memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung berdampak pada kehidupan mereka.

Pemerintah dapat memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan transparansi Penganggaran APBD kepada masyarakat,. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat berkembang di hampir seluruh negara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Era globalisasi yang menuntut masyarakat bergerak cepat dan dinamis serta bertindak efektif dan efisien dalam menghadapi persaingan yang begitu ketat membuat teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian canggih sangat diperlukan keberadaannya. Berdasarkan hal tersebut, beberapa segmentasi kehidupan masyarakat perlahan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada, diantaranya sektor perdagangan, produksi barang dan jasa, pendidikan, keamanan, sosial, politik, termasuk dalam bidang pemerintahan.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pemerintahan diwujudkan dengan sebuah sistem yang disebut dengan *E-government* atau *Electronic Government*. *E-government* merupakan suatu sistem dimana pemerintah menggunakan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet dalam memberikan pelayanan dan juga informasi kepada publik. *E-government* juga merupakan sebuah sistem yang akan mengintegrasikan instansi-instansi pemerintah yang ada serta mempermudah jalur bagi masyarakat luas dalam mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan. Dengan adanya pemerintahan berbasis *electronic*, pola birokrasi lama yang penuh dengan unsur korupsi, kolusi dan nepotisme diharapkan dapat berganti menjadi sistem birokrasi yang bersih, transparan, serta akuntabel dalam proses administrasi. *E-government* juga akan menjauhkan kesan pemerintah yang tidak melek teknologi atau apatis terhadap berbagai perubahan yang terjadi.

Penerapan sistem *E-government* di Indonesia diatur didalam Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*. Di dalam Inpres tersebut diatur bahwa setiap lembaga pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah wajib untuk membuat, mengembangkan serta menerapkan konsep *E-government* pada masing-masing lembaga, terutama berkaitan dengan penyediaan informasi kepada publik. Hal lain yang melatar belakangi penerbitan Inpres tersebut adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang mekanisme atau konsep *E-government* yang harus diterapkan pada masing-masing lembaga baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah serta memberikan persepsi atau pemahaman yang sama bagi semua instansi pemerintah tentang *E-government* sehingga akan terjadi keseragaman dalam menerapkan sistem atau konsep *E-government* pada masing-masing instansi pemerintah.

Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 mengharuskan instansi pemerintah ditingkat pusat dan daerah memiliki *website* sebagai sistem yang akan menaungi *E-government* itu

sendiri yang tercantum dalam butir ke 18 yang menjabarkan strategi keenam dalam pengembangan *E-government*. *Website* merupakan salah satu media yang memungkinkan warga untuk mengakses informasi publik dengan mudah. Kelebihannya adalah bisa diakses di semua tempat selama ada koneksi internet dan tidak terbatas oleh waktu. Publikasi informasi anggaran daerah di *website* resmi Pemda akan memudahkan publik dalam mengakses informasi anggaran daerah bila tersedia dengan baik dan lengkap.

Dalam mewujudkan transparansi melalui *E-government*, ada beberapa aspek transparansi yang dapat menjadi tolak ukur. Krina (2003:15) menjelaskan aspek-aspek untuk mengukur transparansi ialah sebagai berikut:

1. Penyediaan informasi yang jelas;
2. Kemudahan akses informasi;
3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan; dan
4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa.

Jika aspek-aspek tersebut dapat dilaksanakan, maka transparansi melalui *E-government* dapat terwujud dengan mudah.

Pada Provinsi Sumatera Selatan, instansi pemerintahan baik itu pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kabupaten telah menerapkan sistem *E-government*. Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan salah satu dari Pemerintah Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang telah menerapkan sistem *E-government* melalui pembuatan situs atas *website* Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dapat diakses melalui alamat www.kaboki.go.id.



Gambar 1. Tampilan menu di website resmi Kabupaten Ogan Komering Ilir (Sumber : website resmi Pemkab Ogan Komering Ilir)

Dapat di lihat dari Gambar 1 tampilan beberapa menu yang ada di beranda website resmi Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di dalam website ini terdapat beberapa menu, yakni menu “Beranda” “Profil” “Pemerintah” “Potensi Daerah” “Fasilitas” “Pelayanan Publik” “Daftar Pengumuman” dan “Webmail”.



Gambar 2. Tampilan menu Beranda di website resmi Kab. Ogan Komering Ilir (Sumber : website resmi Pemkab Ogan Komering Ilir)

Gambar 2 memperlihatkan tampilan Menu “Beranda” yang memuat berita-berita harian terbaru, *popular news*, serta sub menu “Berita Daerah” dan “Pemerintah”

Menu “profil” terdiri dari beberapa submenu, yakni submenu “pemerintah” yang memuat profil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan komering Ilir serta terdapat submenu “arti lambang” dan “sejarah” Kabupaten ini. Menu “Potensi Daerah” terdiri dari submenu Bidang Pertanian, Bidang Pariwisata, dan Bidang Investasi. Selain menu “Profil” dan “Potensi Daerah”, menu “Pemerintah” juga memuat submenu yang terdiri dari submenu “Visi&Misi” “Program Kerja” dan “SKPD” Submenu “SKPD” ini terintegrasi dengan beberapa *website* resmi SKPD yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tetapi, untuk SKPD yang tidak memiliki *website* resmi, maka tampilan yang muncul ialah Dokumen TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) dari SKPD yang bersangkutan.



Gambar 3. Tampilan menu *link* Terkait di *website* resmi Kab. Ogan Komering Ilir (Sumber : *website* resmi Pemkab Ogan Komering Ilir)

Website resmi Kabupaten Ogan Komering Ilir telah terhubung atau terintegrasi dengan beberapa *website* lembaga pemerintah lainnya, seperti *website* resmi Negara Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, KPK, LPSE Kab. Ogan Komering

Iilir, SiPongi (Karhutla Monitoring Sistem), Produk Hukum JDIH, dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. *Fitur* “LAPOR!” didalam *website* yang langsung terhubung dengan *website* resmi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. *Fitur* ini dapat digunakan oleh ini merupakan sebuah mekanisme pengaduan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir yang ingin memberikan pengaduan dan aspirasi mengenai permasalahan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir secara langsung ke Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tetapi, didalam *website* resmi Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak tersedia kontak resmi seperti nomor telepon atau alamat *e-mail* pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir..

Diluncurkannya *website* resmi tersebut bertujuan untuk semakin membuka keran informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sekaligus menjembatani komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan masyarakat luas. Apabila penerapan *E-government* tersebut berjalan dengan lancar dan baik, maka akan sangat menunjang transparansi dan keterbukaan informasi oleh pemerintah kepada publik, terutama mengenai transparansi APBD.

Namun, penerapan *E-government* untuk mewujudkan transparansi APBD oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir masih terdapat beberapa kekurangan. *Website* resmi Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak menyediakan informasi mengenai APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir sehingga tidak ada kemudahan akses bagi masyarakat untuk mengetahui informasi mengenai APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penyediaan informasi mengenai Penganggaran APBD melalui *E-government* di Kabupaten Ogan Komering ilir masih kurang transparan berdasarkan aspek-aspek transparansi yang telah diuraikan oleh Krina (2003:15). Maka dari itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai

Transparansi APBD di Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui *E-government*. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi transparansi APBD di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

Bagaimana transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui *E-government* di Kabupaten Ogan Komering Ilir?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah :

Mengetahui transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui *E-government* di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Untuk kedua manfaat tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat mmeberikan wawasan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Administrasi Negara, terutama berkaitan dengan keuangan negara khususnya mengenai transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui *E-government* di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dijadikan sebagai masukan bagi pihak pihak yang terkait dalam mewujudkan transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui *E-government* di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Creswell, John W. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi Keempat*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar
- Dwiyanto, Agus, 2011, *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Jakarta. PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Indrajit, Richardus Eko. 2000. *Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*. Jakarta:PT. Eko Media Komputindo.
- _____. 2002. *Membangun Aplikasi E-government*. Jakarta:PT Elek Media Komputindo.
- _____. 2004. *E-government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta:Andi Offset.
- Krina, Loina Lalolo. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional
- Lukito, Penny Kusumastuti. 2014. *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi Ke Depan*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sj.sumarto, Hetifah. 2009. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Solihin, D. 2006. *Perencanaan Pembangunan Partisipatif*. Jakarta. Sekolah Tinggi Pemerintahan Abdi Negara.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: AFABETA.
- Syafiie, Inu Kencana. 2001. *Filsafat Pemerintah Mencari Bentuk Good Governance yang Sebenarnya secara Universal*. Jakarta: Perca
- Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Pustaka Indonesia Press.

Yufuf, A. Muri. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana

Karya Akademis

Oktari, Rahmelya. 2012. *Analisis Penerapan Transparansi pada Portal Resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (www.jakarta.go.id)*. Disertasi tidak diterbitkan. Depok: Program Studi Ilmu Admisnitasi Negara Universitas Indonesia

Peraturan

Undang- Undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 05 tahun 2015 tentang Registrari Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara.

Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*

Instruksi Mendagri No.188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah

Internet

Dakelan, Putra. *Tahapan dan Prosedur Penyusunan APBD*. 2018. <https://www.cakdakelan.com/2018/01/tahapan-dan-prosedur-penyusunan-apbd.html>(di akses pada tanggal 18 November 2018)

Kementrian Keuangan. *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah*. 2017. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5747>(di akses pada tanggal 18 November 2018)

Komisi Transparansi dan Partisipasi Kabupaten Lebak. *Mengenal Proses Perencanaan Pembangunan*. 2010. <http://ktp-lebak.blogspot.com/2010/09/mengenal-proses-perencanaan-pembangunan.html>(di akses pada tanggal 18 November 2018)